
Hutan dan Negative Peace: Sebuah Efek bagi Perdamaian Global

Yunita Asmawati^{*1}, Arry Bainus²

¹ Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Palangka Raya
Jl. Hendrik Timang, Palangka Raya, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21,
Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: ^{*1}yasmawati80@gmail.com,

Abstract

The presence of global peace likewise the conflict could be triggered by the environment such as forest degradation of some states. As presently, climate change has been occurred all over the globe and causes conflict. However, this study used the Galtung thought of peace to discover the peace side through qualitative methodology with all the complexity. Therefore, it revealed some classifications of peace notably each characteristic of the peace as far as the metapsychology of peace. Furthermore, it showed how the environment naturally can lead to global peace.

Keywords— *Deforestation, Forest degradation, Negative peace, Peace, Positive peace*

Abstrak

Kehadiran perdamaian global layaknya konflik dapat dipicu oleh lingkungan seperti degradasi hutan dari beberapa negara. Saat ini, perubahan iklim telah terjadi di seluruh belahan dunia dan menyebabkan terjadinya konflik. Namun penelitian ini, dengan menggunakan pemikiran Galtung tentang perdamaian berusaha untuk menemukan sisi perdamaian melalui metodologi kualitatif dengan segala kerumitannya. Oleh karena itu pula, tulisan ini mengungkapkan beberapa klasifikasi perdamaian terutama karakter pada masing-masing klasifikasi perdamaian hingga pada metapsikologi perdamaian itu sendiri. Lebih jauh, tulisan ini menunjukkan bagaimana lingkungan secara alami dapat membawa perdamaian global.

Kata kunci— *Deforestasi, Degradasi hutan, Konflik, Perdamaian, Perdamaian negatif*

1. Pendahuluan

Perdamaian dalam konstelasi hubungan internasional menjadi sebuah dinamika yang silih berganti dengan konflik. Bahkan banyak kasus intermestik

dilatarbelakangi dengan prakarsa penciptaan perdamaian global. Tentunya prakarsa tersebut turut menjadi sumbangsih bagi hadirnya banyak kajian dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Mulai dari kasus-kasus *hard politic* yang mainstream

hingga kasus-kasus *soft politic* yang telah menguat dan beragam.

Satu di antara persoalan *soft politic* yang tidak dapat terabaikan dalam beberapa dekade ini adalah persoalan lingkungan. Dinamikanya kini menyita perhatian banyak aktor, baik aktor negara maupun non negara. Persoalan hutan menjadi sebuah contoh dari sekian banyak persoalan lingkungan yang mengemuka. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki hutan tropis yang besar adalah di Kalimantan Tengah. Sejauh ini, hutan dengan berbagai kerusakannya lebih banyak diperhatikan untuk melihat eksistensi konflik di dalamnya.

1.1. Latar Belakang

Sejatinya telah jelas bahwa fenomena kerusakan hutan ini membahayakan. Terlebih ketika luas tutupan hutan yang ada berdampak negative terhadap keberlangsungan fisik bumi. Seperti terjadinya perubahan suhu bumi secara signifikan hingga berdampak pada perubahan iklim secara global. Semakin meningkatnya degradasi hutan tentu menambah besar pula penguapan karbon dari tumbuhan dan tanah ke atmosfer bumi.

Ketika penguapan terjadi, maka sebagian panas yang dihasilkan daratan dan lautan akan diserap oleh atmosfer, termasuk karbondioksida. Pancaran panas ini kemudian akan kembali diradiasikan ke bumi. Bahaya dari penguapan karbondioksida sebagai gas yang berat di atmosfer bumi inilah yang seharusnya dihindari karena sangat berdampak besar kepada berbagai hal di bumi. Layaknya kepada kondisi alam seperti bencana alam. Selain itu pada hakikatnya bahwa bencana alam sangat berkaitan erat dengan ketiadaan hutan sebagai sebuah penyangga bumi dari bencana.

Kemudian perubahan secara fisik pada tutupan dan luas hutan ternyata tidak menjadi satu-satunya persoalan intermestik. Dampak krusial lain adalah pengaruhnya pada perdamaian global. Bahkan sejak berabad-abad lalu telah banyak peperangan dengan latar belakang kelangkaan sumber daya alam. Ketiadaan sumber daya alam di wilayah kekuasaan sebuah aktor, menjadi alasan untuk melakukan ekspansi yang mengarah pada peperangan. Indonesia dapat dikatakan sebagai contoh aktor negara yang telah mengalami masa penjajahan tersebut pada kisaran tahun 1800an yang dilakukan oleh Belanda. Adapun aktor yang dimaksud dalam konteks ini adalah negara. Sebagaimana pertimbangan sejarahnya, bahwa negara sebagai “sebuah aktor” mengingat era sebelum globalisasi mengedepan dan mempengaruhi banyak sisi kehidupan, negara menjadi aktor tunggal dalam konstelasi politik internasional.

Perubahan terjadi ketika globalisasi membawa berbagai kemajuan dan kemudahan teknologi yang tidak dapat terejawantahkan ketika tidak ada dukungan yang sangat besar dari alam. Kemajuan tanpa batas kemudian memberikan kekhawatiran atas kelangkaan hutan. Terutama ketika keberlanjutannya tidak dapat terjamin untuk mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Bagaimanapun hutan terus mengalami penyusutan manakala sumber daya tersebut tidak diganti atau mengalami pembenahan kembali akibat eksploitasi yang tidak terkontrol.

Jika sebelum meluasnya globalisasi, perang secara fisik lebih banyak mewarnai sejarah untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan ketiadaan sumber daya alam. Namun pasca globalisasi perang justru terjadi secara halus dan terstruktur. Perang menjadi cara lain dalam

mempertahankan politik luar negeri ketika kerusakan alam atau degradasi lingkungan terjadi di suatu wilayah yang berdampak fatal bagi wilayah lain di muka bumi.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena semacam ini yang mengakibatkan dinamika perdamaian dan konflik selalu menjadi latar belakang bagi kehidupan sosial. Telah banyak pula penelitian terkait konflik dan degradasi lingkungan. Bagaimanapun konflik dipandang sebagai sebuah dinamika yang memiliki capaian dan makna tersendiri di setiap perubahannya. Oleh karena itu, Degradasi lingkungan, khususnya hutan, kini menjadi pemicu bagi terganggunya perdamaian di kawasan domestik yang akan dengan mudah juga memberikan pengaruh yang sama kepada tataran internasional.

Sebaliknya *'bagaimanakah wujud perdamaian global yang mampu dihasilkan oleh hutan di tengah maraknya konflik global dalam persoalan degradasi hutan?'* Mengukuhkan perdamaian melalui pertanyaan ini menjadi satu hal yang seharusnya dikaji lebih komprehensif. Meskipun dengan sedikitnya ruang bagi perdamaian dibandingkan jumlah konflik yang kini terlahir atas persoalan hutan. Karena kini sejatinya hutan memiliki potensi sangat besar bagi terwujudnya perdamaian global.

Isu konseptual yang diangkat dalam tulisan ini adalah membaca hutan sebagai sumbangsih bagi perdamaian global. Kondisi tersebut dibaca melalui konsep perdamaian (*peace concept*) Webel dan Galtung. Sehingga secara detail dipaparkan berbagai disparitas antara konsep dan fakta deforestasi dan *forest degradations* di kawasan Kalimantan Tengah.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Degradasi Hutan dan Deforestasi

Memahami konsep degradasi hutan dalam beberapa referensi terkait pula dengan deforestasi. Keduanya memiliki kemiripan namun tetap memiliki perbedaan dalam konsepnya. Deforestasi sendiri dapat dipahami dari tulisan Daguma, Atela dkk (Daguma dan Atela, 2019: 6) bahwa: *"Deforestation is the conversion of forested areas to non-forest land use such as arable land, urban use, logged area or wasteland"*.

Lebih lanjut tentang degradasi hutan dituliskan Daguma, Atela dkk (Daguma dan Atela, 2019: 6) dituliskan: *"In developing countries, deforestation and forest degradation debates attribute forest losses to the interactions between multiple factors on livelihoods and development"*.

Pemahaman di atas dilatarbelakangi oleh fokus pemahaman REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation Plus*) di negara-negara berkembang. Khususnya bagaimana hutan tropis ini menjadi sumber kehidupan yang sangat besar bagi local yang mampu memberikan inisiatif yang sangat berarti bagi local hingga ke ranah global (Daguma dan Atela, 2019: 6).

Definisi lain yang juga cukup relevan dengan kondisi riil adalah yang dikemukakan oleh MacDicken dari FAO (MacDicken, 2012: 5): *"deforestation is the conversion of forest to another land use or the long-term reduction of tree canopy cover below the 10% threshold"*.

Definisi yang selaras dituliskan oleh Tejaswi (Tejaswi, 2007: 6) bahwa degradasi hutan: *'Merupakan sebuah proses yang mengarah kepada kemunduran massa atau struktur tutupan vegetasi atau*

komposisi spesies hutan secara temporer atau permanen'. Sehingga Tejaswi menuliskan secara umum bahwa *degradasi hutan merupakan* reduksi jangka panjang pada seluruh supply keuntungan hutan yang potensial. Termasuk di dalamnya adalah reduksi kayu biodiversity dan produk atau layanan lainnya pada hutan (Tejaswi, 2007: 6).

2.2. Positive Peace-'Strong, or Durable Peace'

'*Strong, or Durable Peace*', merupakan perdamaian yang sangat kuat atau dapat dikatakan mapan dan mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ketika menyatakan bahwa kondisi perdamaian dalam *positive peace* ini sangat kental dengan ketidakhadirannya perang. Galtung sendiri memaknai '*Strong, or Durable Peace*' ekuivalen dengan '*Positive Peace*'.

Strong or durable peace merupakan kondisi di mana perdamaian relatif kuat pada keadilan, kesetaraan dan kebebasan, serta relatif sedikitnya korban dan kesengsaraan pada level sosial (Webel & Galtung, 2007: 11).

Kondisi pada *positive peace* masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk terjadinya kondisi yang harmoni, adil dan setara sebagaimana pendapat Galtung (Webel & Galtung, 20017: 6). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan aktor juga sangat beragam.

Positive peace sendiri menjadi salah satu pandangan alternative kaum Realist dan sebagaimana pemikiran Galtung dimaknai tidak semata sebagai sebuah kondisi dengan absennya peperangan atau absennya *interstate violence* (kekerasan antar negara) di dalamnya. Namun lebih dari itu bahwa *positive peace* merupakan kondisi yang merfer kepada sebuah kondisi sosial di mana tindakan-tindakan eksploitasi terminimalisir atau bahkan

tereliminasi dapat dikatakan absen. Terlebih bahwa absennya kekerasan yang dimaksud Galtung, tidak semata yang terjadi secara terbuka namun juga termasuk fenomena yang secara halus memberi fondasi bagi terjadinya korban terstruktur dalam kondisi sosial tersebut.

Adapun Institute for Economics & Peace atau IEP mengemukakan setidaknya 8 pilar yang harusnya telah mengalami kemapanan dalam pertumbuhannya (Institute for Economics & Peace, 2018: 7). Kondisi saling mempengaruhi tersebut dapat dilihat melalui figure di bawah ini:

Gambar 1. Pilar dalam Positive Peace



Sumber: Institute for Economics & Peace (2018: 7)

2.3. Negative Peace- Weak or Fragile Peace

Adapun *weak or fragile peace* sebagai satu kondisi yang berlawanan dengan

strong or durable peace yang dimaknai Galtung ekuivalen dengan *positif peace*. *Weak or fragile peace* yang dalam formulasi Galtung merujuk kepada bentuk perdamaian *negative peace*. Baik kondisi *positive peace* maupun *Negative peace* ini juga ditandai dengan absennya perang, dan tidak terdapatnya korban-korban militer yang terorganisir. Sebagaimana dituliskan Galtung bahwa "*Negative peace has historically denoted the 'absence of war' and other forms of widescale violent human conflict*" (Webel & Galtung, 20017: 6). Pendapat Galtung ini sebagaimana dikutip pula oleh Tilahun bahwa *negative peace* menurut Galtung "... *negative peace (as) the absence of violence, absence of war...*" (Tilahun, 2015: 251).

Sedangkan menurut Global Peace Index (GPI, 2018: 78), bahwa *negative peace* setidaknya terdapat tiga domain perdamaian. Domain pertama, *Ongoing Domestic and International Conflict*, yaitu yang berkenaan dengan keterlibatan aktor dalam konflik di tataran internal ataupun eksternal hingga pada peran dan durasi keterlibatan aktor dalam konflik (GPI, 2018: 78). Domain kedua, yang disebut dengan *Societal Safety and Security* yaitu di mana level harmoni atau *discord* dalam satu bangsa dievaluasi (GPI, 2018: 78). Sedangkan domain ketiga adalah *Militarisation* yang menjadi refleksi atas level keterhubungan negara terhadap pembangunan militer dan akses terhadap berbagai persenjataan dengan level perdamaian baik itu di tataran domestik maupun internasional (GPI, 2018: 78).

Lebih lanjut Galtung mencoba mengkomodir kemunculan *negative peace* ini melalui pemikiran di abad 20an oleh intelektual Perancis bernama Raymond Aaron (Barash dan Webel, 2002: 6-7). Perdamaian *negative* ini dimaknai sebagai sebuah kondisi perdamaian yang memiliki durasi perdamaian yang mampu bertahan

lama atau bahkan tidak bertahan lama (Barash dan Webel, 2002: 6-7).

2.4. Metapsikologi Perdamaian

Perdamaian menjadi latar belakang kondisi bagi eksistensi sosial dalam sebuah kebahagiaan baik itu secara personal dan umum (Webel & Galtung, 2007: 11). Bahkan latar belakang perdamaian tersebut menjadi sesuatu yang *taken for granted* hingga hilangnya kondisi damai itu sendiri.

Bahkan perdamaian menjadi satu yang abadi layaknya sebuah kerajaan perdamaian. Sehingga sebagaimana kondisi *status quo ante bellum* (kondisi sebelum terjadi peperangan) hingga kondisi di mana manusia sangat mendambakan perdamaian meskipun harus membayar untuk mendapatkan perdamaian tersebut (Webel & Galtung, 2007: 11).

Selain membuat dua kategori perdamaian di atas (sebagaimana *strong* dan *weak peace*), Galtung juga merunut keduanya untuk dikembalikan kepada beberapa pilihan spectra yang lebih besar. Setidaknya kedua kategori perdamaian baik itu yang '*strong or durable peace*' maupun yang '*weak or fragile peace*' dapat diteliti lebih jauh hingga kepada pilihan tiga spectral tersebut.

The Spectral of Peace atau spektra perdamaian tersebut dapat ditilik dari sisi metapsikologi perdamaian di mana Galtung mengadopsi istilah metapsikologi ini dari Freud (Webel & Galtung, 2007: 10). Ketiga spektra tersebut adalah *inner peace*, *outer peace* dan *interpersonal peace* (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Ketiganya menilik keunikan aspek psikologis dari dua kategori perdamaian di atas. Merunut lebih jauh pada aspek psikologis ini menjadi penting untuk mendalami secara detail tentang duduknya potensi perdamaian pada hutan sebagai sebuah kapabilitas negara.

Spectra Pertama bahwa dorongan perdamaian atas berbagai konflik hutan berawal dari ranah *inner peace* sebagaimana menurut Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10).

Baik itu bagi masyarakat di kawasan local hingga masyarakat global, *inner peace* ini yang kemudian memberikan cerminan atas dorongan yang ada dalam alam bawah sadar manusia.

Spectra kedua, menurut Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10) adalah *outer sphere*, di mana pada bagian inilah persoalan perdamaian bertalian dengan persoalan ekonomi. Melalui *outer sphere* ini motif berbagai insiden karhutla dapat dibentangkan bagaimana aspek di luar *inner space* mempengaruhi sebuah keputusan.

Ketiga, adalah spekta intersubjektif atau *interpersonal peace dalam pemikiran* Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Kondisi ini menjadi satu cara untuk merunut jauh bagaimana pandangan intersubjektif. Hal ini menurut Galtung mampu mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari hingga pada perilaku dalam melakukan perannya di lingkungan pekerjaan.

Hal penting lainnya terkait dengan *inner* dan *outer space* ini menurut Galtung bahwa terdapat posisi intersubjektif yang menjadi median bagi *inner* dan *outer space* (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Sehingga menjadi penting pula dilihat lingkungan dan interpersonal, energi dan lembaga yang memperkuat atau menumbangkan keseimbangan psikologis, atau *inner peace* (Webel & Galtung, 2007: 11).

Ketiga, adalah spekta intersubjektif atau *interpersonal peace dalam pemikiran* Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Kondisi ini menjadi satu cara untuk merunut jauh bagaimana pandangan intersubjektif. Hal ini menurut Galtung mampu mempengaruhi perilaku manusia

dalam kehidupan sehari-hari hingga pada perilaku dalam melakukan perannya di lingkungan pekerjaan.

3. Metode Penelitian

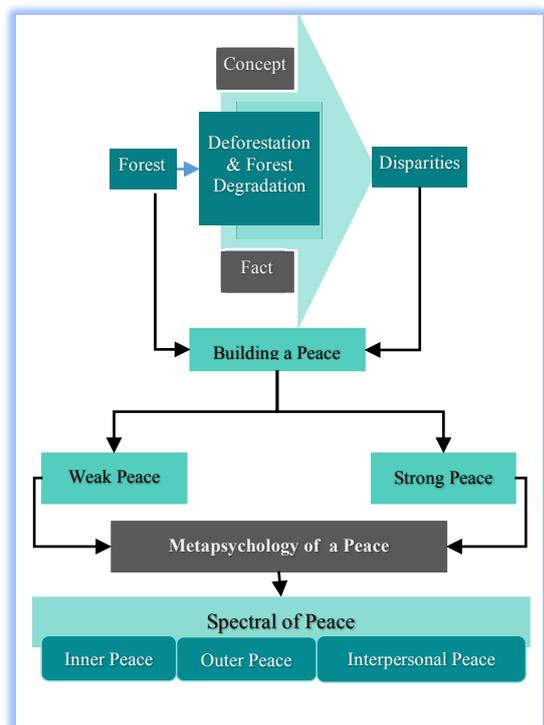
Tulisan ini difondasikan pada desain penelitian kualitatif sehingga mampu berbicara tentang berbagai rangkaian teoretis dengan verbal yang lebih detail. Secara garis besar, tulisan ini berusaha mengelaborasi persoalan dengan membuat *study linkage* antara dua konsep yaitu konsep deforestasi dan forest degradations dengan konsep perdamaian dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas.

Literatur review dimulai dengan membawa konsep deforestasi dan degradasi hutan dalam lingkup pemahaman dari FAO (MacDicken, 2012: 5-6). Hal ini dilakukan sebagai alat untuk mendudukan terlebih dahulu persoalan deforestasi dan forest degradation di Kalimantan Tengah. Upaya ini kemudian mampu memperlihatkan disparitas antara fakta dan konsep tersebut. Apa yang menjadi pertimbangan adalah hutan yang seharusnya mampu menjadi sumbangsih bagi perdamaian global menjadi sangat samar dibandingkan rentannya kemunculan konflik bagi masyarakat global.

Sehingga ketika deforestasi dan degradasi hutan telah duduk, arah pencarian bentuk perdamaian melalui hutan adalah dengan cara membuat keterhubungannya dengan konsep perdamaian. Kemudian, perdamaian diklasifikasikan ke dalam konsep perdamaian pada dua kategori menurut Webel dan Galtung yaitu *strong peace* dan *weak peace* (Webel & Galtung, 2007: 11). Satu pilihan secara teoretis dari kedua level perdamaian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan fakta di lapangan.

Elaborasi pilihan tersebut pada tahap selanjutnya dirunut kembali ke arah awal tentang konsep metapsikologi perdamaian yang diadopsi dari pemikiran Webel dan Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Terlebih detail adalah dengan membawa persoalan hutan ini dalam lebih lanjut ke ranah metapsikologi yang mencakup beberapa spektra dalam pemikiran Webel dan Galtung (Webel & Galtung, 2007: 10-11). Alur ini dilakukan untuk melihat perdamaian global yang mampu diwujudkan dalam persoalan intermestik melalui eksistensi hutan tropis di Indonesia. Adapun alur penelitian dapat dilihat pada *study linkage* di bawah ini:

Gambar 2. *Study Linkage*



Sumber: Diolah berdasarkan desain penelitian dan Kajian teoretis peneliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Degradasi Hutan dan Deforestasi

Pemunculan kata “*in developing countries*” dalam pemahaman Daguma dan Atela di atas menjadi menarik, utamanya ketika dihadapkan kepada fakta di lapangan dengan segenap perdebatannya. Bahkan ketika REDD+ belum dimunculkan sebagai sebuah inisiatif perlindungan hutan dari degradasi dan deforestasi. Bahkan negara berkembang telah mengedepan sebagai satu aktor yang tidak hanya menyediakan hutan tersebut.

Lebih dari itu, dalam bingkai yang tidak memihak keadilan, negara berkembang seperti Indonesia sekaligus diklaim sebagai *emitter* terbesar dunia. Sedangkan emisi terbesar yang dihasilkan Indonesia berasal dari hutan. Perdebatan ini terus muncul seiring dengan upaya perbaikan pada lahan hutan yang telah mengalami pengurangan.

Hal menarik ketika FAO menyatakannya dengan sebuah istilah konversi pada hutan menjadi lahan lainnya. Kata konverdsi ini menjadi satu poin yang sangat krusial melihat berkurangnya hutan di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah saat ini telah mengalami konversi hutan yang sangat signifikan luasnya. Seluas 12.561.867,57 ha berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tahun 2016 tentang Luas Kawasan Hutan dan Peraian (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Data tersebut mencakup 13 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah. Jumlah ini sudah mencakup Hutan Lindung, Hutan Produksi (yang sudah tercakup pula di dalamnya lahan yang masih tetap, terbatas hingga yang dapat dikonversi). Selain itu pada jumlah di atas juga sudah pula mencakup luasnya Suaka Alam dan Pelestarian Alam,

dan hutan pada kawasan Perairan. Tentunya jumlah ini tidak dapat dikatakan luas.

Jumlah lahan yang dapat dikonversi pada luas lahan di atas 2.256.739,03 ha (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Sedangkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sepanjang musim kemarau setiap tahunnya tidak hanya terjadi di lahan yang dapat dikonversi saja. Inilah yang kemudian menjadikan konversi hutan terus mengalami peningkatan pada jumlahnya. Hal ini dapat dibandingkan dalam data statistic yang tercatat pada BPS Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Luas kawasan hutan dan peraian di tahun 2015 seluas 15.331.000 (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Sehingga selisih yang ada dapat dikatakan sebagai konversi pada hutan yaitu seluas 2769132.43 ha (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016). Jumlah konversi inilah yang telah terjadi sepanjang 2015 hingga 2016 (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2016).

Perubahan ini dikaitkan dengan kemunduran struktur dan atau massa pada tutupan vegetasi atau komposisi hutan terjadi pada atribut-atribut hutan. Sehingga hal ini mengarah kepada kapasitas produktif yang lebih rendah yang disebabkan oleh adanya peningkatan gangguan pada hutan. Hal ini juga menjadi satu perhatian tersendiri di mana semakin tidak berkurangnya kegiatan pembakaran lahan dan hutan yang kemudian menurunkan kemampuan hutan dalam memproduksi.

Adapun yang membahayakan adalah proses degradasi hutan itu sendiri ditilik dari skala waktunya. Karena proses tersebut dapat terjadi dari beberapa tahun atau bahkan hingga berdekade lamanya. Karena itu pula, pada rentang waktu terjadinya kerusakan tersebutlah berbagai

perubahan terjadi secara local yang berimbas pada global

4.2. Positive Peace

Ketika dikaitkan dengan ketiadaan perang, maka persoalan degradasi hutan memiliki relevansi yang cukup. Akan tetapi ketika bergerak kepada kriteria lain dalam kriteria *positive peace*, maka fakta mulai menjauh dari gagasan yang diusung Galtung tersebut. terlebih ketika berbagai kemapanan berbagai pilar sebagaimana pemahaman Global Peace Index (GPI) yang menjadi gagasan di dalam *positive peace*.

Oleh karena itu tidak mudah menyandingkan ketiadaan perang dengan ketiadaan ketidakadilan pada pilar-pilar yang seharusnya mapan dalam lingkup *positive peace* terjadi bersamaan dalam satu waktu. Terlebih ketika ketidakhadiran tersebut juga disandingkan kembali kepada ketidakhadiran berbagai kekerasan baik itu secara terbuka ataupun yang terjadi secara halus. Kelangkaan pada sebuah kondisi yang cukup sempurna ini dapat dilihat baik itu di ranah kehidupan manusia di ranah lokal maupun global.

4.3. Hutan dalam Batas Negative Peace

Secara teoretis, kondisi absennya perang menjadi sangat relevan dengan kondisi yang dialami oleh Indonesia dalam persoalan hutan dan degradasinya terkait dengan kebakarannya. Akan tetapi disparitas berupa peristiwa kekerasan yang terjadi secara tidak terstruktur tidak dapat dinafikan. Meskipun kehadiran pihak militer dalam hal kekerasan tidak menjadi satu tolak ukur, karena konflik kekerasan juga melibatkan masyarakat tertentu dengan kepentingan yang kuat terhadap penggunaan lahan.

Sehingga yang menjadi poin utama pada durasi perdamaian negative terkait dengan peristiwa kabut asap atas aktifitas karhutla adalah terjadinya berbagai dinamika konflik. Dinamika konflik dalam kurun waktu yang sangat singkat dalam setiap tahunnya. Bahkan kondisi berulang dalam beberapa dekade ini menjadikannya sangat mapan berada di kondisi *negative peace*.

Sebagai satu contoh adalah yang terjadi pada tahun 2016 di mana kebakaran hutan menjadi satu pemicu tensi konflik dengan negara tetangga karena efek kabut asap yang tebal (Asmawati, 2017: 151). Bahkan kabut asap terekspor hingga ke belahan benua lain. Kasus ini kembali mengulang di tahun 2019 di mana wilayah negara tetangga mengalami efek yang sama dengan yang di alami oleh Indonesia pada saat kabut asap tebal melanda. Pemikiran Aaron, sebagaimana diungkapkan dalam kajian pustaka di atas, memnunjukkan bahwa perdamaian menjadi satu karakter dari pandangan (*neo-*)*realist* dalam konteks perang dan damai (Barash dan Webel, 2002: 6). Relevansi yang muncul pada kategori pemikiran Aaron ini adalah pada sisi perdamaian yang dialami oleh Indonesia.

Meskipun persoalan ini memicu konflik yang tidak sampai memunculkan perang fisik secara terbuka. Akan tetapi berbagai protes dan kekhawatiran negara lain tersesbut memberikan tekanan tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang seharusnya memiliki investasi sumber daya hutan yang tinggi di dunia. Meskipun yang patut digarisbawahi adalah bukan karena tekanan dari luar ini pula yang menjadikan berbagai solusi ini diupayakan di ranah domestik.

Aktifitas alih guna lahan hutan yang dilakukan oleh nasyarakat secara senagaja atau tidak memberikan dampak besar. Meskipun tidak dapat dipungkiri pula

bahwa keterlibatan negara lain memberikan pula dampak besar atas peristiwa karhutla di Indonesia. Seperti kepemilikan perusahaan asing yang eksistensinya di Indonesia cukup besar. Terlebih dengan aktifitas perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan lahan dan produksi hasil hutan.

Sehingga dengan demikian, hutan tidak semata menjadi sebuah wadah aktifitas bagi masyarakat domestik, namun juga bagi pihak asing. Hal ini terlepas dari berbagai dinamika perizinan penggunaan lahan hutan Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana keadilan dalam masalah pada akses penggunaan hutan masih terus dipersoalkan. Kondisi ini memotret luasnya aktifitas yang ditampung oleh suatu wilayah dalam memberdayakan hutan melampaui kontrol keberlanjutan lingkungan.

Maka meskipun perang dan berbagai aksi kekerasan yang secara masiv tidak ditemukan dalam kondisi perdamaian positif negative, namun keadilan menjadi persoalan yang serius dalam kondisi ini. Karena kembali menurut Galtung bahwa ketidakadilan dan perselisihan personal menjadi karakter *negative peace*, serta ketidakpuasan masyarakat global pada manajemen pengelolaan hutan terjadi secara halus. Selain itu yang menjadi ciri dari *negative peace* yaitu bagaimana kekerasan muncul mengemuka dengan skala yang meluas. Adapun salah satu contoh kekerasan tersebut adalah persoalan konflik kemanusiaan.

Meskipun *weak or fragile peace* dalam pandangan Galtung menjadi satu spektrum perdamaian yang tidak sempurna, namun justru banyak negara dan budaya yang memiliki kondisi ini. Sedangkan dalam catatan sejarah budaya manusia dan masyarakat sangat jarang memiliki kualifikasi yang mengarah kepada *strong*

peace tersebut (Webel & Galtung 2007: 11).

Pandangan ini yang kemudian memberikan sugesti bahwa perdamaian yang ada pada level *positive peace* ini hadir tidak hanya ketika perang absen dalam kondisi tersebut. Secara garis besar, kondisi *positive peace* ini juga menghindari terjadinya kekerasan yang menyebabkan munculnya korban. Melalui perspektif ini pulalah yang kemudian menjadi satu peristiwa yang menandai perdamaian dalam sejarah Pharaou Mesir. Kejadian di mana pernyataan tentang perdamaian mengarah kepada *negative peace* atau perdamaian negatif dengan adanya tindakan kebajikan yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

4.4. Hutan dalam Kerangka Metaspikologi Perdamaian Galtung

Bilah-bilah perdamaian ini selaras dengan pemikiran Galtung. *Peace* dalam pemikiran Galtung dikategorikan ke dalam dua kategori baik itu yang lebih kuat maupun yang lebih lemah. Galtung mengkategorikannya mulai dari '*Strong, or Durable Peace*' hingga pada '*weak or fragile peace*' (Webel & Galtung 2007: 11).

Ketika persoalan degradasi hutan diletakkan pada pernyataan Galtung yang menyatakan bahwa perdamaian menjadi latar belakang eksistensi social baik secara umum maupun personal, maka persoalan hutan mampu memberika dinamika tersebut. Hutan dalam batas kritis yang masih mampu memberikan keleluasaan bagi manusia dalam menghirup udara segera tentunya berdampak positif. Baik itu bagi lingkungan domestik maupun di luar batas wilayah Kalimantan hingga di luar batas Indonesia. Dampak tersebut dalam tulisan ini berupa perdamaian yang tanpa disadari mengejawantah menafikan

kehadiran konflik. Perdamaian dalam hal ini lahir dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu melalui hutan dengan kondisi yang masih tidak banyak tereksplorasi.

Dinamika perdamaian yang dianggap *taken for granted* hingga hilangnya perdamaian dan berubah menjadi warna konflik. Tepatnya ketika hutan mulai memberikan kekhawatiran dan berbagai dampak negatif. Terlihat bagaimana dalam satu dekade terakhir ini kebakaran lahan dan hutan semakin membahayakan karena kabut asap yang semakin tebal di permukaan bumi. Bahkan level udara yang semakin menguning pekat dengan kabut tebal asap tersebut memicu kerugian mulai dari berbagai kerugian transportasi, pendidikan, ekonomi dan berbagai penyakit. Terpenting secara luas adalah bahwa peristiwa yang dalam satu decade ini terus terjadi di sepanjang musim kemarau mampu menjadi pemicu tereduksinya perdamaian di level negara.

Hal lain adalah imaji Indonesia di kancah global bahwa hutan mampu menjadi pengikat perdamaian bagi berbagai kepentingan negara di dunia. Karena dengan memburuknya kondisi hutan sama halnya dengan memberi tensi bagi kondisi damai di antara negara-negara tersebut. Karena menurut Galtung, ketika perdamaian telah tereduksi atau hilang maka perdamaian menjadi satu yang sangat dicari dan tidak mudah diperoleh, seperti ketika manusia berada dalam masa krisis dan perang.

Sedangkan pada konteks degradasi hutan, perang fisik sebagaimana dimaksud Galtung tidak sampai terjadi. Namun kondisi ini cukup berpotensi meningkatkan tensi konflik utamanya di negara-negara terdekat hingga negara lain yang memiliki perhatian tinggi terhadap eksistensi hutan.

Negara dalam hal ini perlu bertindak tidak saja melingkupi kawasan domestic guna memulihkan kondisi hutan untuk

mereduksi konflik yang ada. Bagaimanapun kawasan domestik di wilayah terdampak kabut asap kebakaran hutan kemudian mencoba banyak hal guna memulihkan tensi konflik. Salah satunya pemerintah Indonesia bergerak untuk terus mencari *hot spot* Karhutla demi menyelamatkan sumber daya hutan yang terbakar tersebut. Indonesia dalam dengan demikian mengusahakan perdamaian tidak lagi dengan tanpa imbalan.

Bahkan istilah 'kerajaan perdamaian' yang diungkapkan Galtung di sun bab sebelumnya, dapat memberikan kemudahan bagi seisi bumi. Sebagai contoh adalah kemudahan yang terjadi ketika lingkungan sedang tidak mengalami gangguan kebakaran hutan. Maka perdamaian tersebut menjadi satu yang paling diusahakan. Bahkan kerugian tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pemulihan kebakaran kawasan hutan dan lahan yang didominasi oleh lahan gambut.

Sementara pada kondisi seperti *status quo ante bellum* dalam konteks persoalan hutan di Indonesia telah pula terlibat dalam berbagai upaya yang tidak cuma-uma untuk kembali mengedepankan perdamaian global melalui elemen hutan. Hal ini misnya dengan telah banyaknya kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam perbaikan keberlanjutan hutan yang telah rusak. Terlebih dengan Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis yang luas menjadi aktor yang cukup aktif dalam menyuarkan lingkungan hidup kancah internasional. Tentunya kesepakatan dan kerjasama ini dilakukan atas dasar saling menguntungkan meskipun masing-masing pihak memiliki kewajiban tertentu untuk mencapai tujuan dari kesepakatan tersebut.

Artinya perdamaian tidak didapatkan dengan cara yang cuma-cuma. Meskipun demikian, banyaknya perjanjian dan

kerjasama yang telah diimbuhkan dalam mendukung pengembalian kawasan hutan yang terdegradasi tidak serta merta menjadi jaminan keberlanjutan yang kokoh tanpa pelanggaran. Karena layaknya mata rantai yang telah banyak terputus, meskipun perjalanan kerjasama dan berbagai perjanjian tersebut masih berjalan, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius. Maka kemudian sisi-sisi perdamaian terus tergerus.

Sehingga, pada kondisi semacam ini penting untuk merunut kembali kepada arah yang lebih besar bagi kemunculan perdamaian melalui *spectra* perdamaian. Spektra pertama, *inner space* dalam tulisan ini termasuk di dalamnya ketika sebuah Lembaga memiliki bilah kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat tertentu. Maka persepsi dan dorongan atas pentingnya perdamaian berkesempatan sangat besar untuk muncul dari *inner space* ini. Bahkan *inner space* ini pula yang akan memberikan gambaran mental dan emosi manusia untuk menyuarkan pentingnya sebuah kebijakan yang mempertegas tindakan karhutla. Terkait di dalamnya bagaimana karhutla ini menjadi sebuah hal yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat secara luas di kawasan wilayah hutan tropis.

Kedua, pada *outer space*, terbakar dan dibakarnya lahan hutan yang dimulai dengan berkembangnya orientasi ekonomi tanpa pertimbangan sustainability hutan tentu tidak meninggalkan warisan ases hutan bagi generasi berikut. Akan tetapi, tidak homogenya masyarakat dunia dalam melihat motif kebakaran hutan ini dari sisi keuntungan ekonomi tentu memberikan warna tersendiri bagi pemerhati lingkungan.

Masyarakat global melihat bagaimana kepekatan dan buruknya cuaca pada saat kawasan terdampak asap. Keuntungan secara ekonomi ini kemudian dapat

menjadi boomerang pada saat yang sama. Beberapa aktor, di satu sisi, dapat mempertimbangkan keuntungan secara ekonomi atas hasil pembakaran hutan. Yaitu dengan memanfaatkan lebih lanjut kawasan terbakar tersebut bagi aktifitas ekonomi.

Namun di sisi lain, aktor lain seperti aktor individu tidak serta merta memberika pembenaran atas kegiatan tersebut. Kemudian *Inner space*, pada kondisi ini, muncul sebagai sebuah keinginan manusia pada normalnya untuk tidak terimbas efek kebakarah lahan dan hutan tersebut. Melalui *inner space* manusia yang menjadi satu penyeimbang tersendiri ketika *inner space* terlibat diberlakukan dengan kesadaran penuh manusia. Yaitu melihat alam sebagai bagian dari kapabilitas yang mampu berpotensi besar bagi perdamaian.

Outer sphere ini pula yang mampu menekan aktor dalam membuat satu kekuatan politik pada ranah global. Tepatnya dengan melihat bagaimana kelangkaan sumber daya alam hutan menjadi sebuah kemahalan di pasar global. Adapun tekanan aktor yang memiliki keselarasan persoalan keuntungan ekonomi dapat menjadi pemicu bagi tindakan tanpa adanya kontrol keseimbangan alam. Bahkan hal lain adalah degan *outer sphere* ini yang kemudian meunculkan gambaran bagaimana pasar global mampu menjadi *power-driven agents* bagi pelaku karhutla.

Galtung dalam pemahamannya merrefer kepada pertalian ekonomi di dalam *outer space* ini pada perdamaian yang akan tercipta. Namun bagaimnaapun juga kegiatan ekonomi yang telah mengglobal memberikan ketidakmampuan aktor untuk tidak terlibat. Hal ini pula yang akan memberikan dampak bagi aspek social politik lainnya berjalinan bersama kepentingan ekonomi. Sejauh itu pula, kepentingan ekonomi yang masih memiliki dukungan keberlanjutan alam tentu tidak

menjadi satu hirauan. Persoalan terletak ketika *power-driven agents* ini mewujud sebagai satu yang berpihak pada keuntungan ekonomi semata tanpa pertimbangan keberlanjutan hutan sebagai penopang kehidupan bumi. Bahkan hingga kepada berjalannya dorongan, insting dan perubahan atas kawasan hutan.

Ketiga, spekta intersubjektif atau *interpersonal peace*. Persitiwa kebakaran lahan dan hutan mengalami berbagai penilaian mulai dari penilaian yang objektif hingga kepada yang bersifat subjektif. Oleh karena itu pula, penilaian intersubjektif ini mengedepan pada kondisi pembenaran pengkonversian alam hutan. Secara sederhana, aspek intersubjektif ini akan memberikan pengaruh bagi terwujudnya perdamaian. Meskipun ketika pengaruh tersebut dimulai dari sesuatu yang tidak subjektif.

Persoalan intersubjektif ini dapat saja berbeda, namun bagaimana kekuatan perdamaian melalui hutan ini dapat dieskalasi tentu eksistensi intersubjektif tidak dapat dinafikan. Intersubjektif dapat dengan mudah menjadi satu alat untuk melihat hutan sebagai satu potensi perdamaian. Khususnya dengan menyadari kembali posisi intersubjektif yang menjadi median bagi *inner* dan *outer space* sebagaimana menurut Galtung (Webel & Galtung 2007: 10-11).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perdamaian sendiri bukanlah menjadi suatu hal yang harus sempurna dan tanpa akhir (*perfect or unending*) misnya sebagaimana Kant dalam konseptualisasi *perpetual peace*-nya. Terlebih ketika persoalan perdamaian ini didudukkan dalam konteks degradasi hutan dan deforestasi. Layaknya berbagai karakter

yang disuguhkan di dalam bilah perdamaian positif yang sangat sempurna. Paling tidak eksistensi ini kurang relevan terjadi mengingat berbagai sifat dan kepentingan yang beragam pada diri manusia.

Namun, bukan berarti pula bahwa perdamaian lingkungan yang dipicu oleh degradasi hutan itu sebuah hal yang tidak masuk akal atau bahkan tidak menjadi bagian dari gen manusia. Karena hutan sebagai sebuah kapabilitas negara mampu menjadi pemicu yang besar bagi menguatnya perdamaian. Sederhananya, hutan hanya perlu untuk tetap tumbuh tanpa menghilangkan batas konversi yang sudah dilegalkan. Selain itu, hutan hanya perlu sustainabilitas untuk tumbuh dan menjadi aset kebutuhan bagi generasi berikutnya.

Ketika pemikiran tentang pemenuhan kebutuhan yang menjadi *branding* dunia pada perhatian lingkungan, maka pada kondisi tersebut dimulainya keberlanjutan hutan. Sehingga, ketika keberlanjutan akses ini terwujud, setidaknya hutan tetap potensial menumbuhkan perdamaian. Meskipun berada pada level *negative peace*. Mata rantai ini menjadi perlu ketika melihat bagaimana konflik terus terjadi, dan menjadikan hutan sebagai pemicu yang besar bagi konflik bahkan bencana.

Perdamaian dalam kasus hutan layaknya sebuah keadilan dan kebahagiaan, yang secara historis merupakan kondisi yang silih berganti. Sebagai contoh adalah silih bergantinya sifat individu dengan kolektif, antara psikis dan kebijakan. Bahkan terkadang silih bergantinya kondisi tersebut juga bersifat *intangibile* (tidak nampak) seperti terjadinya konflik yang terselubung di kalangan masyarakat. Silih berganti pula pada catatan sejarah lainnya yang mana konflik justru terakomodir untuk direduksi.

Selain itu, hal yang sangat mempengaruhi terwujudnya perdamaian

adalah hal seperti *outer sphere* yang dapat memunculkan persingat kekuatan pasar global hingga memunculkan potensi *power-driven agents*. Menjadikan homogenya pasar global pada satu keinginan yang selaras dengan inner perdamaian yang mendunia akan sulit. Meskipun hal ini dilakukan tanpa menyurutkan berbagai kapasitas ekonomi dan menjadikannya seimbang dengan kepentingan alam. Tentunya perdamaian lahir dari tidak semata absennya perang. Bahkan ketika perdamaian layaknya 'dibeli' dengan cara yang mahal.

Perdamaian dalam persoalan hutan pun menjadi *taken for granted* hingga batas tertentu yang menghilangkan perdamaian itu sendiri. Meskipun ketiadaan perang secara fisik masuk dalam dua kategori yang mewarnai persoalan hutan, namun berbagai perdebatan atas eksistensi perdamaian dan pencarian solusi konflik menjadi satu kondisi perdamaian lain yang hadir bagi kehidupan sosial.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Barash, David P. dan Charles P. Webel. 2002. *Peace and Conflict Studies*. United States of America: Sage Publications, Inc.
- Crocker, Chester A dan Fen Osler Hampson. 2001. *Turbulent Peace; The Challenges of Managing International Conflict*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Institute for Economics & Peace (IEP). 2018. *Global Peace Index 2018; Measuring Peace in A Complex World*. Sydney: The Institute for Economics & Peace (IEP).
- Institute for Economics & Peace (IEP). 2018. *Positive Peace Report 2018;*

Analysing The Factors that Sustain Peace. Sydney: The Institute for Economics & Peace (IEP).
MacDicken, Kenneth. 2012. *Forest Resources Assessment Working Paper; Terms and Definitions*. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO).
Webel, Charles dan Johan Galtung. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Taylor & Francis e-Library, Routledge.

Acuan artikel dalam Jurnal:

Tilahun, Temesgen. 2015. "Johan Galtung's Concept of Positive and Negative Peace in the Contemporary Ethiopia: An Appraisal", dalam *International Journal of Political Science and Development*. Vol. 3(6), pp. 251-258, DOI: 10.14662/IJPSD2015.033. <http://www.academicresearchjournals.org/IJPSD/Index.html> [3/12/2019].
Daguma, Lalisa A dan Joanes Atela dkk. 2019. "Deforestation and Forest Degradation as an Environmental Behavior: Unpacking Realities Shaping Community Actions", dalam *Land* 2019,8,26;doi:10.3390/land8020026 www.mdpi.com/journal/land [20/9/2019].

Acuan dari Prosiding:

Giri Tejaswi. 20017. "Manual on Deforestation, Degradation, and Fragmentation Using Remote Sensing and GIS; Strengthening Monitoring, Assessment and Reporting (MAR) on Sustainable Forest Management (SFM) in Asia" (*GCP/INT/988/JPN*). Forest Department-Food Agriculture Organization of UN (Online). [21/9/2019].

Acuan artikel dalam website:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2016. *Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (ha), 2016* dalam <https://kalteng.bps.go.id/statistictable/2017/10/25/566/luas-kawasan-hutan-dan-perairan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah-ha-2016.html>. Diakses pada 13 Oktober 2019.

Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi :

Asmawati, Yunita. 2017. "Diplomasi Lingkungan Indonesia kepada Norwegia dalam Menerapkan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus)", Disertasi Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Indonesia.